



KR-Franz Boedisukamanto

**SEMAAN ALQURAN: Mengawali rangkaian kegiatan HUT ke-79 SKH 'Kedaulatan Rakyat', keluarga besar PT BP 'Kedaulatan Rakyat' mengadakan Semaaan Alquran Bersama 30 Juz di Griya 'KR', Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta, Selasa (24/9/2024). Acara ini dibuka Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos mewakili Ketua Panitia HUT ke-79 KR Yoeke Indra Agung Laksana SE. Turut hadir Komisaris Utama Imam Satriyadi SH dan Komisaris M Wirmon Samawi SE MIB beserta jajaran Direksi PT BP 'Kedaulatan Rakyat'.**

## KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

# Bareskrim Selidiki Kebocoran Data NPWP

**JAKARTA (KR)** - Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam penyelidikan kasus dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Bareskrim dalam penyelidikan dugaan kebocoran data NPWP adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kami tetap bekerja sama dengan kementerian/ lembaga yang berkepentingan terkait dengan hal tersebut. Kami juga menunggu komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa nanti forensiknya, topologinya, tipikalnya seperti apa. Itu menjadi suatu hal yang penting untuk arah penyelidikan ini," ucap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (24/9).

Mengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan ti-

dak menjawab dengan jelas. "Masih berproses, masih dikomunikasikan," kilahnya.

Dugaan kebocoran data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor

telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Senin (23/9), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa berdasarkan analisa sementara, sebagian data NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemilikinya. "Diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemilikinya, baik NIK maupun NPWP," ungkapnya.

Hadi mengatakan lembaganya bersama BSSN juga terus melakukan validasi terhadap data-data yang diduga dibocorkan oleh peretas tersebut, baik data NIK, NPWP, maupun nomor telepon. (Ant/Has)-f

## ANTISIPASI KEMENTERIAN BARU DPR Wacanakan Penambahan Komisi

**JAKARTA (KR)** - Wacana penambahan komisi di DPR sedang dimatangkan menyusul rencana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Penambahan komisi di DPR harus dilakukan agar bisa memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan, soal kemungkinan penambahan komisi sedang dimatangkan. Kalau kemudian dilaksanakan harus sesuai mekanisme. "Saat ini alat kelengkapan dewan di DPR RI terdiri atas sejumlah badan dan 11 komisi," ujar Puan Maharani, Selasa (24/9).

Menurut Puan penambahan komisi akan terjadi jika memang nantinya ada penambahan kementerian. Saat ini aturan batas jumlah kementerian sebanyak 34 kementerian sudah diubah menjadi tidak dibatasi sesuai kebijakan presiden. Selain itu, Puan memastikan penam-

bahan kementerian akan dilakukan sesuai dengan mekanisme agar tidak menjadi kesempatan untuk bagi-bagi jabatan. Jika terlaksana, Puan mengatakan, penambahan komisi di DPR RI bakal dibicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) menjadi undang-undang.

Salah satu ketentuan krusial yang dilakukan perubahan dalam RUU ini, yakni mengakomodasi pembentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan presiden, sehingga tidak dibatasi hanya 34 kementerian, seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah. (Ant)-f

## KASUS PENYEBARAN DATA BKN

# Polri Dalam Pelaku Lainnya

**JAKARTA (KR)** - Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri tengah mendalami kemungkinan adanya dugaan pelaku lain dalam kasus ilegal akses dan penyebaran data elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka berinisial BAG (25), seorang guru honorer di Banyuwangi Jawa Timur.

"Untuk apakah yang bersangkutan (tersangka BAG) ada komunikasi dengan pelaku lain? Hal ini sedang kami dalam. Sementara itu, hasil pemeriksaan kami menunjukkan bahwa dia melakukan sendiri," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta, Selasa (24/9).

Himawan menegaskan, masih mendalami jejak digital tersangka untuk mengetahui apakah ada pelaku lain atau tidak. Selain itu, tersangka BAG merupakan lulusan perguruan tinggi dengan jurusan pendidikan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi dan infor-

masi. "Tersangka telah mengakses situs breachforums sejak 2021, kemudian membuat kembali akun baru pada akhir tahun 2023. Modus yang digunakan pelaku itu bergabung di situs breachforums.st dan mempelajari seperti apa komunikasi di forum," ucap Himawan.

Usai mempelajari cara-caranya, tersangka melakukan ilegal akses terhadap situs <https://satudataASN.BKN.go.id/> dengan salah satu akun milik admin BKN yang didapatkan dari salah satu forum di breachforums.st. Dengan akses tersebut, tersangka berhasil mengunduh 6,3 gigabita data pada situs Satu Data ASN. Selanjutnya data itu dijual di situs breachforums.

Terkait dengan jenis apa saja data yang diunduh, hal tersebut juga masih didalami oleh Ditipidsiber. "Memang jumlahnya 6,3 gigabita. Akan tetapi, terkait dengan jenis datanya, itu sedang kami verifikasi sehingga nanti mungkin akan berkoordinasi dengan BKN dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk melakukan mitigasi pascainsiden ini," ujar Himawan. (Ant/Has)-f

## 'SOFT APPROACH' BEBASKAN PILOT SUSI AIR

# Kapolri Apresiasi Tim Negosiator

**JAKARTA (KR)** - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh tim negosiator pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrrens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Apresiasi itu disampaikan ketika menemui secara langsung tim pembebasan pilot Philip di Gedung Mabes Polri Jakarta, Selasa (24/9). Tim negosiator yakni Edison Gwijangge, Yospian Wandikbo dan Erlina Gwijangge. "Saya sangat mengapresiasi karena tim ini menggunakan pendekatan *soft approach* karena kita tahu, dalam operasi pembebasan ini, keselamatan sandera merupakan prioritas utama," kata Kapolri.

Kapolri mengaku bersyukur bahwa pendekatan dengan cara tersebut dapat membebaskan Philip dengan keadaan selamat. "Alhamdulillah, sandera dapat bebas dengan aman dan selamat. Kondisinya pun dalam keadaan sehat ketika kembali," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri mendengarkan cerita detik-detik pembebasan pilot Susi Air tersebut dari tim yang terlibat. Mereka bercerita bahwa Kapten Philip disandera pada tanggal 7 Februari 2023 oleh anggota KKB Nduga pimpinan Egianus Kogoya. Peristiwa itu

terjadi ketika Mark melakukan penerbangan menuju Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Atas kejadian tersebut, TNI dan Polri menggelar Operasi Paro dengan melibatkan 978 personel yang terdiri atas 513 anggota TNI dan 465 anggota Polri. Cara yang diterapkan adalah mengedepankan pendekatan *soft approach* melalui upaya negosiasi.

Usai menjadi korban penyanderaan KKB kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan, pada akhirnya, Philip berhasil dievakuasi oleh tim pembebasan sandera pada tanggal 21 September 2024. Ketika itu, Philip dijemput oleh tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarak, Kabupaten Nduga, dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob Batalyon B/Timika untuk proses cek kesehatan.

Setelah dinyatakan sehat, Philip diterbangkan dari Timika menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI AU. Setibanya di Jakarta, Philip diserahkan oleh Pemerintah RI yang diwakili oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett yang mewakili pemerintah negaranya. (Ant/Has)-d

## Adi Bayu dan Kusno, Pjs Bupati Bantul dan Sleman



KR-Riyana Ekawati

**Gubernur DIY Sultan HB X menyampaikan ucapan selamat kepada Pjs Bupati Sleman dan Pjs Bupati Bantul.**

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Adi Bayu Kristanto sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan (DLHK) DIY Kusno Wibowo sebagai Pjs Bupati Sleman di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (24/9).

Pelantikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.L.3-3805 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penjabat Bupati di DIY. Adi Bayu Kristanto di-

lantik menggantikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslich yang mengambil cuti karena maju kembali di Pilkada Bantul. Sedangkan Kusno Wibowo menggantikan jabatan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo yang juga kembali maju di Pilkada Sleman.

Sultan mengatakan, pelantikan kedua Pjs Bupati tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kevakuman jabatan kepala daerah. Sebab kepala daerah terkait telah cuti di luar tanggungan negara dan menjalankan kampanye pencalonan kepala daerah tahun 2024. Adapun un-

tuk Kabupaten Gunungkidul, estafet kepemimpinan diteruskan oleh Wakil Bupati Heri Susanto. Dengan begitu proses pengambilan keputusan penting tetap dapat dilaksanakan sesuai kewenangan yang ada.

"Penjabat bupati harus melakukan koordinasi intens dengan aparat keamanan dan jajaran Pemerintah. Khususnya dalam mengawal proses Pilkada, melalui deteksi dini dan cegah dini, dalam bingkai penegakan hukum secara tegas dan transparan," tandas Sultan HB X.

Kusno Wibowo menyampaikan komitmennya untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada. Ada lima tugas utama, salah satunya menjaga netralitas ASN.

Hal senada disampaikan Adi Bayu Kristanto, yang menegaskan komitmennya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. (Ria)-f

## KPP PRATAMA WONOSARI Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik



**WONOSARI (KR)** - Sebagai bagian dari institusi pelayanan publik, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari senantiasa sepenuh hati berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan visi misi KPP Pratama Wonosari menjadi kantor pelayanan pajak unggul yang menyelenggarakan sistem pelayanan modern, efisien, dan dipercaya masyarakat dalam melayani Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Dengan mengusung motto Berbakti Sepenuh Hati untuk Negeri, KPP Pratama Wonosari berkomitmen memagang teguh janji pelayanan yaitu Wani Becik yang memiliki filosofis arti berani (wani) dalam hal berbuat kebaikan (becik). Wani Becik mengandung makna berjanji sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk Wajib Melayani dengan Berintegritas, Cepat, Ikhlas dan Kompeten di bidangnya.

Kepala KPP Pratama Wonosari, Agung Subchan Kurnianto menuturkan sebagai wujud pelayanan, maka secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan yang telah diberikan melalui Survei Kepuasan Masyarakat KPP Pratama Wonosari Tahun 2024. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Independen.

Ada Sembilan unsur dalam penilaian survei yaitu Persyaratan Pelayanan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Sarana dan prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif dan Perilaku Pelaksana. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan indeks Survei Kepuasan mencapai 96,01 untuk Triwulan I dan meningkat menjadi 100 untuk Triwulan II yang artinya mutu

pelayanan termasuk dalam kategori A dengan hasil kinerja Sangat Puas.

"Hasil ini selaras dengan hasil survei mandiri yang kami laksanakan, yaitu Sadranan (Survei Mandiri Kepuasan Layanan) untuk periode Agustus dan September 2024. Dengan hasil responden menyatakan sangat puas terhadap layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Wonosari," ucapnya.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkenan menjadi responden dalam program survei ini. Hasil survei yang ada saat ini akan kami terus pertahankan dan tingkatkan untuk mencapai kesempurnaan dalam pelayanan kepada wajib pajak," urainya kembali.

Pada tahun 2023, KPP Pratama Wonosari telah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dan telah mencapai kinerja penerimaan pajak sebesar 104%. KPP Prata-

ma Wonosari telah menetapkan 20 (dua puluh) Standar Pelayanan dibagikan kepada wajib pajak.

"Tiada gading yang tak retak, maka dalam rangka perbaikan terus menerus, kami selalu terbuka menerima saran, kritik, dan masukan yang membangun, yang dapat masyarakat sampaikan secara langsung kepada kami melalui berbagai saluran pengaduan," tandas Agung.

KPP Pratama Wonosari terus membutuhkan dukungan dari masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul, terutama dalam rangka menjadi kantor pelayanan kantor dengan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK WBBM). (\*3)



Link Pelayanan KPP P Wonosari

